



KAJIAN TENTANG RUU TNI KONTROVERSI 2025

DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN



1. Pendahuluan

RUU TNI 2025, yang bertujuan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), telah menjadi topik hangat di Indonesia, terutama karena potensi dampaknya terhadap hubungan antara militer dan pemerintahan sipil. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa RUU ini kontroversial, dengan struktur yang runut, logis, dan mudah dibaca, meliputi latar belakang, usulan kontroversial, risiko dan peluang, kasus konkret, perbandingan dengan negara lain, serta rekomendasi, berdasarkan informasi yang tersedia hingga 17 Maret 2025.

2. Latar Belakang dan Konteks

RUU TNI 2025 diajukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperbarui kerangka hukum yang mengatur TNI, yang saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Undang-undang ini menetapkan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan, dengan fokus pada menegakkan kedaulatan negara dan melindungi keutuhan wilayah. Namun, revisi ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa perubahan yang diusulkan dapat mengembalikan pola fungsi ganda militer, yang pernah dominan selama Orde Baru di bawah Presiden Suharto. Pada era tersebut, militer memiliki peran ganda (dwifungsi ABRI), yaitu tidak hanya bertugas dalam pertahanan, tetapi juga aktif dalam politik, pemerintahan, dan kehidupan sosial-ekonomi. Setelah Reformasi 1998, upaya besar dilakukan untuk memisahkan militer dari politik, dengan TNI dikembalikan ke fungsi utamanya, yaitu pertahanan negara.

3. Usulan Kontroversial dalam RUU TNI

RUU TNI 2025 mengandung beberapa usulan yang menjadi sumber kontroversi utama:

a. Pasal 3: Perubahan Struktur Komando

- Usulan ini mungkin memperkuat peran Kementerian Pertahanan dalam struktur komando TNI, yang dapat mengubah keseimbangan kekuasaan antara militer dan pemerintahan sipil.
- Hal ini dapat meningkatkan kontrol sipil, tetapi juga berisiko mengurangi kontrol langsung Presiden atas militer.

b. Pasal 7: Peran TNI dalam Penanganan Narkotika

- Pasal ini dipercaya memperluas peran TNI dalam memerangi narkoba, yang mungkin mencakup operasi penegakan hukum seperti penggerebekan atau pengawasan di kawasan perbatasan.
- Saat ini, penanganan narkoba sebagian besar dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), dengan dukungan terbatas dari TNI dalam operasi tertentu, seperti pengamanan. RUU TNI tampaknya mengusulkan peran yang lebih langsung, yang dapat meliputi operasi penegakan hukum, seperti penangkapan atau penggerebekan, yang biasanya menjadi tanggung jawab polisi.
- Kontroversi ini muncul karena pendekatan militer yang tegas dan hierarkis mungkin tidak sesuai untuk penanganan narkoba, yang membutuhkan sensitivitas terhadap hak asasi manusia, seperti perlindungan terhadap tersangka atau korban.

c. Pasal 47: Perluasan Jabatan Sipil bagi Prajurit TNI Aktif

- Usulan ini meningkatkan jumlah jabatan sipil yang dapat dijabat oleh prajurit TNI aktif dari 10 menjadi 16, meliputi jabatan seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Negara, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara, Badan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Negara, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (SAR), Badan Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
- Kritik menunjukkan bahwa hal ini dapat meningkatkan pengaruh militer dalam pemerintahan sipil, mengancam pemisahan kekuasaan dan kontrol sipil atas militer.

d. Pasal 53: Perubahan Batas Usia Pensiun

- Usulan ini menaikkan batas usia pensiun bagi tamtama hingga 56 tahun, bintara hingga 57 tahun, perwira hingga 62 tahun, dan perwira fungsional hingga 65 tahun, dengan pilihan bagi prajurit yang sudah pensiun untuk kembali bergabung sebagai cadangan jika memenuhi syarat.

- Hal ini dianggap dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan prajurit TNI, tetapi juga berisiko menyebabkan stagnasi organisasi dan memperpanjang pengaruh militer dalam jabatan sipil.

4. Beberapa Kejadian Lain yang Berkaitan dengan Kontroversi

Kejadian-kejadian ini tidak berkaitan langsung dengan usulan pasal-pasal di atas, namun banyak kalangan menghubungkan dengan “maksud di belakang layar” terkait dengan pengusulan pasal-pasal kontroversial dalam RUU TNI:

- Kasus pembahasan RUU TNI sebelumnya memicu sorotan dan polemik karena digelar di hotel mewah pada akhir pekan, yang dianggap kurang transparan dan tidak mencerminkan partisipasi publik ([Kebut Pembahasan RUU TNI di Hotel Mewah Bintang 5: Pemerintah dan DPR Menyakiti Hati Rakyat • Amnesty International Indonesia](#)). Kritik ini menambah dimensi kontroversi, terutama karena beberapa poin dianggap dapat melegitimasi dwifungsi militer Orde Baru.
- Kasus Mayjen Novi Helmy sebagai Dirut Bulog: Diangkat pada Februari 2025 sebagai Direktur Utama Perum Bulog, meskipun masih prajurit TNI aktif, yang dianggap melanggar UU TNI saat ini. Kontradiksi statusnya menunjukkan kebutuhan akan kejelasan hukum, yang RUU TNI berusaha akomodasi ([Profil Dirut Bulog Baru Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya](#)).
- Kasus Letkol Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet: Diangkat pada Oktober 2024 sebagai Sekretaris Kabinet, jabatan yang tidak termasuk dalam 10 jabatan sipil yang diizinkan, memicu debat tentang legalitas ([TB Hasanuddin: Posisi Letkol Teddy Sebagai Seskab Langgar UU TNI, Harus Mundur dari Militer](#)

5. Analisis Risiko dan Peluang

Setiap usulan dalam RUU TNI membawa peluang dan risiko yang signifikan:

a. Peluang

- **Peningkatan Kapabilitas Keamanan Nasional:** Dengan keahlian militer, TNI dapat meningkatkan efektivitas penanganan narkoba, terutama dalam operasi besar seperti penggerebekan atau pengamanan wilayah perbatasan.

- **Efisiensi Sumber Daya:** Memanfaatkan prajurit TNI untuk posisi sipil dan operasi narkotika dapat menghemat biaya dan waktu, terutama untuk operasi yang membutuhkan keahlian teknis atau logistik.
- **Koordinasi yang Lebih Baik:** Kehadiran TNI dalam penanganan narkotika dan posisi sipil dapat memperlancar koordinasi antara sektor militer dan sipil, terutama dalam situasi darurat.

b. Risiko

- **Ancaman terhadap Supremasi Sipil:** Penempatan prajurit TNI di posisi sipil dan peran dalam penanganan narkotika dapat melemahkan kontrol sipil atas militer, yang merupakan prinsip dasar demokrasi.
- **Konflik Kepentingan:** Prajurit TNI yang terlibat dalam penanganan narkotika atau menjabat posisi sipil mungkin menghadapi konflik antara tugas militer dan sipil.
- **Kekhawatiran Hak Asasi Manusia:** Pendekatan militer yang tegas dapat memicu pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam operasi narkotika yang melibatkan penggunaan kekuatan.
- **Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas:** Budaya militer yang tertutup dapat mengurangi transparansi, terutama dalam operasi narkotika dan pengelolaan posisi sipil.
- **Potensi Korupsi:** Peran TNI dalam penanganan narkotika dan posisi sipil dapat menciptakan peluang korupsi, terutama jika melibatkan pengelolaan dana besar.

6. Perbandingan dengan Negara Lain

Perbandingan dengan peran militer di negara lain memberikan wawasan tambahan untuk memahami implikasi RUU TNI:

- **Jerman:** Setelah Perang Dunia II, Jerman membubarkan tentara lama dan membentuk Bundeswehr dengan ikatan historis yang terputus dari masa lalu militeristik. Kontrol sipil sangat ketat, dengan Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh warga sipil dan larangan keras terhadap intervensi militer dalam politik. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk mencegah otoritarianisme, memberikan pelajaran bagi Indonesia untuk memperkuat kontrol sipil atas TNI.

- **Prancis:** Militer Prancis memiliki sejarah intervensi politik, terutama pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, tetapi sejak era pasca-Perang Dunia II, kontrol sipil ditingkatkan melalui Kementerian Pertahanan yang kuat dan parlemen yang aktif. Peran militer dalam operasi luar negeri (seperti di Afrika) dibatasi ketat oleh pemerintah sipil, menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam urusan sipil harus diatur dengan jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- **Inggris:** Inggris memiliki tradisi panjang kontrol sipil atas militer, dengan angkatan bersenjata yang tunduk pada Parlemen dan Kementerian Pertahanan. Militer Inggris tidak memiliki sejarah intervensi politik sejak abad ke-17, dan peran mereka dalam urusan sipil, seperti penanganan krisis domestik, sangat terbatas serta diatur ketat oleh hukum. Ini menegaskan pentingnya mekanisme hukum yang kuat untuk menjaga supremasi sipil, yang relevan bagi Indonesia.
- **Thailand:** Militer Thailand telah melakukan beberapa kali kudeta, termasuk pada 2006 dan 2014, menunjukkan kecenderungan intervensi politik yang kuat. Peran militer dalam pemerintahan sipil meningkat di bawah junta militer, meskipun ada upaya demokratisasi sesudahnya. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa kontrol sipil yang kuat, peran militer dapat mengarah pada otoritarianisme, sebagaimana dikhawatirkan di Indonesia.
- **Filipina:** Militer Filipina memiliki sejarah intervensi politik, tetapi sejak era pasca-Marcos, kontrol sipil telah ditingkatkan. Namun, peran militer dalam "perang terhadap narkoba" di bawah Presiden Duterte menunjukkan risiko penggunaan militer untuk penegakan hukum sipil, yang mirip dengan kekhawatiran Pasal 7 di Indonesia, dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan.
- **Pakistan:** Militer Pakistan memiliki pengaruh besar dalam politik, dengan beberapa kali mengambil alih kekuasaan melalui kudeta (misalnya, 1999). Peran militer dalam pemerintahan sipil tetap kuat, bahkan dalam demokrasi, menunjukkan bahwa tanpa batasan ketat, perluasan peran seperti dalam RUU TNI dapat menggerus demokrasi, sebagaimana dikhawatirkan oleh analis di Indonesia.

7. Argumen Pendukung dan Penolakan

Meskipun fokus utama adalah kontroversi, ada argumen yang mungkin mendukung RUU ini:

- Pemerintah mungkin berargumen bahwa keterlibatan TNI dalam penanganan narkoba diperlukan untuk menjamin stabilitas nasional, terutama di wilayah perbatasan atau operasi besar.

- Peningkatan batas usia pensiun dapat dilihat sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan memanfaatkan pengalaman mereka lebih lama.

Namun, argumen penolakan lebih dominan, dengan kelompok masyarakat sipil, seperti Imparsial, menilai bahwa tren ini serupa dengan era Orde Baru, sebagaimana dilaporkan dalam Imparsial Menilai Alasan Penunjukan TNI Aktif Jadi Dirut Bulog Serupa di Orde Baru.

8. Rekomendasi

ISO Center Indonesia berpendapat bahwa sebaiknya pengesahan RUU TNI ini ditunda dan diperbaiki substansi kontroversialnya dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Namun jika Pemerintah beserta DPR RI mensahkannya, berikut adalah rekomendasi untuk menangani kontroversi RUU TNI:

1. **Definisi Jelas dan Batasan:** Pastikan peran TNI dalam penanganan narkoba jelas dan terbatas pada dukungan teknis, bukan operasi penegakan hukum, untuk menjaga supremasi sipil.
2. **Kriteria Ketat:** Tetapkan kriteria ketat untuk keterlibatan TNI, memastikan tidak mengganggu fungsi BNN dan polisi.
3. **Pengawasan Independen:** Bentuk mekanisme pengawasan independen untuk memantau aktivitas TNI dalam penanganan narkoba, memastikan akuntabilitas dan transparansi.
4. **Batasi Jumlah dan Jenis Posisi:** Fokuskan pada posisi yang benar-benar membutuhkan keahlian militer, seperti BNPB dan BNPT, dan hindari posisi yudisial seperti Mahkamah Agung.
5. **Evaluasi Berkala:** Lakukan evaluasi berkala untuk menilai dampak jangka panjang terhadap demokrasi dan supremasi sipil.
6. **Transparansi Publik:** Pastikan semua penunjukan dan aktivitas prajurit TNI di posisi sipil transparan dan dapat diakses publik.

9. Kesimpulan

Kontroversi RUU TNI 2025 berpusat pada perluasan peran militer di ranah sipil, membawa peluang dan risiko yang perlu dikelola secara hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dan prinsip demokratis. Perbandingan dengan negara Eropa dan Asia menegaskan pentingnya kontrol sipil yang kuat untuk mencegah kemunduran demokrasi,

sebagaimana dikhawatirkan di Indonesia. Dengan lebih dari 2.500 prajurit TNI aktif sudah menjabat di posisi sipil, diperlukan kehati-hatian dalam revisi untuk menjaga supremasi sipil dan mencegah kembalinya dwifungsi militer.

Referensi Utama

- [Isi RUU TNI 2025 dan Daftar Pasal yang Kontroversial](#)
- [RUU TNI Masih Memberi Ruang Kembalinya Dwi Fungsi TNI dan Militerisme](#)
- [Revisi UU TNI, Prajurit Aktif Bisa Isi Jabatan di 16 Lembaga Sipil](#)
- [Rencana RUU TNI Beri Tambahan 5 Jabatan Sipil yang Dapat Diisi Tentara, Termasuk MA dan Kejaksaan Agung](#)
- [RUU TNI Perluas Jabatan Sipil Bisa Diisi Tentara, Jadi 16 Posisi](#)
- [Alasan Panja RUU TNI Setuju Jabatan Sipil Bisa Diisi Militer Bertambah Jadi 16](#)
- [Revisi UU TNI: Kewenangan Ditambah Urusan Narkoba-Siber, Lembaga yang Dijabat Prajurit Aktif Jadi 16](#)
- [Komisi I Bentuk Panja Perubahan UU TNI, Tekankan Kesejahteraan Prajurit](#)
- [Isi Petisi Tolak RUU TNI 2025 YLBHI dan Koalisi Masyarakat Sipil](#)
- [Kontroversi Jabatan Sipil oleh TNI Aktif, Panglima: Dirut Bulog Akan Mundur](#)
- [Mereka Mengkritik Penunjukan Prajurit TNI Aktif Jadi Dirut Bulog](#)
- [Imparsial Menilai Alasan Penunjukan TNI Aktif Jadi Dirut Bulog Serupa di Orde Baru](#)
- [Revisi UU TNI berpotensi mengembalikan Dwifungsi ABRI](#)
- [RUU TNI: Antara Urgensi dan Risiko Inkonstitusionalitas](#)
- [Kebut Pembahasan RUU TNI di Hotel Mewah Bintang 5: Pemerintah dan DPR Menyakiti Hati Rakyat • Amnesty International Indonesia](#)
- [Profil Dirut Bulog Baru Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya](#)
- [TB Hasanuddin: Posisi Letkol Teddy Sebagai Seskab Langgar UU TNI, Harus Mundur dari Militer](#)

Tentang ISO Center Indonesia Indonesia

ISO CENTER INDONESIA adalah penyedia layanan terkait ISO dan Sistem Manajemen yang komprehensif. Kami adalah The Ultimate ISO and Management System Resources yang siap meningkatkan kinerja organisasi Anda melalui penyediaan informasi, pelatihan, implementasi, dan asesmen standar internasional berbasis ISO dan sistem manajemen yang efektif, efisien, out of the box, dan menggunakan metode terkini yang di-enable oleh teknologi dan AI.

Jangan lupa untuk selalu kunjungi situs kami dan mengakses tautan Articles yang memuat kajian-kajian terkini kami dan Download yang berisi video-video pembelajaran, e-book hasil riset kami, dan alat-alat bantu yang berupa kertas-kertas kerja dan template yang selalu kami kinikan.

Semua itu kami persembahkan untuk Anda!

Contact Us :



<https://isoindonesiacenter.com/>



admin@isoindonesiacenter.com



+62 813-184-5942 (Sinthia - Whatsapp/Call)

+62 58-9002-6598 (Louqman – WhatsApp/Call)

+62 89-6551-88175 (Ardi - WhatsApp/Call)